



SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK SELATAN  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Kecamatan Pontianak Selatan yang selanjutnya disebut Kecamatan Pontianak Selatan adalah Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II  
MAKSUD, DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025-2029 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pontianak Selatan yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan yang efektif dan efisien.

BAB III  
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN;
  - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
  - BAB III : TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
  - BAB V : PENUTUP.
- (2) Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025-2029 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029.

## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

- (1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan, serta RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami perubahan akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



FERRY ABDI, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19770211 200212 1 002



KECAMATAN  
PONTIANAK SELATAN

SELALU UNTUK  
PEMERDAYAAN RAKYAT

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 59 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA  
PONTIANAK TAHUN 2025-2029

# RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan periode 2025-2029 dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tujuan dan sasaran serta strategi yang realistis. Dengan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Pontianak Selatan dapat menelaraskan potensi dan peluang serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.

Dalam suatu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah yang membutuhkan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak terkait demi perbaikan Dokumen Renstra ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Pontianak,      September 2025

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematikan Penulisan .....	6
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU</b>	
<b>STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>7</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
2.1.4. Sarana dan Prasarana .....	18
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis....	22
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..	22
2.2.2. Isu Strategis .....	24
<b>BAB III  TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH</b>	
<b>KEBIJAKAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran .....	32
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	33
<b>BAB IV  PROGRAM, KEGIATAN , SUBKEGIATAN,DAN KINERJA</b>	
<b>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>38</b>
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	38
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan .....	70
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Pontianak Selatan Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2025-2029.....	12
Tabel 2.1.2.2 Daftar Nominatif Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	13
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024 .....	14
Tabel 2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2021-2024.....	15
Tabel 2.3.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Pontianak Selatan .....	17
Tabel 2.1.4.1 Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor Kecamatan Pontianak Selatan .....	20
Tabel 2.1.4.2 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025 .....	21
Tabel 2.2.2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025-2029.....	27
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran .....	32
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Pontianak .....	35
Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak selatan Kota Pontianak .....	38
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak .....	38
Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/ dan Pendanaan Pemerintahan Kota Pontianak .....	43
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Pontianak .....	71
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Pontianak..	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2024 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut akan digunakan oleh Walikota kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan Pontianak Selatan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2025 dan 2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-202027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 234);
17. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79)
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Kantor Camat Pontianak Selatan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD

sampai dengan Tahun 2024, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2024, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Substansi penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025-2029 secara garis besar dengan ringkasan isi masing – masing bab sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Merumuskan Latar Belakang, dasar Hukum , Maksud dan Tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan

##### **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 serta Strategi dan arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra.

##### **Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan Output.

##### **Bab V Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pontianak Selatan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan bagi Kecamatan Pontianak Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota Pontianak terbagi menjadi 6 kecamatan, yakni Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara. Kecamatan Pontianak Selatan memiliki luas wilayah 16,52 km<sup>2</sup> atau sekitar 13,49 % dari luas Kota Pontianak, dengan rata – rata suhu udara berkisar antara 26<sup>0</sup> C sampai dengan 27<sup>0</sup> C, dengan kelembapan udara sekitar 86% - 92%. Curah hujan berkisar antara 3.000 mm – 4.000 mm per tahun dan tinggi daratan 0,10 – 1,5 m di atas permukaan laut. Kondisi tersebut mengakibatkan di beberapa wilayah Kecamatan Pontianak Selatan rawan banjir pada saat air pasang laut yang disertai hujan. Apabila sistem drainase yang dibangun kurang baik maka upaya mengatasi wilayah rawan banjir menjadi terhambat akibatnya waktu yang diperlukan oleh air untuk surut menjadi lebih lama. Beberapa sungai/parit di Kecamatan Pontianak Selatan, yaitu Parit Besar, Parit Tokaya, Parit Bansir, dan Sungai Kapuas Besar, menjadi bagian dari sistem drainase yang dibangun dan dijaga kelancaran aliran airnya. Wilayah ini dihuni penduduk sebanyak 97,88 jiwa yang terdiri dari 46.116 Penduduk Laki-Laki dan 47.115 Penduduk perempuan (*Kecamatan Pontianak Selatan Dalam Angka*) dan jumlah Kepala Keluarga 22.874 KK.

Adapun luas administrasi Kecamatan Pontianak Selatan yang terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Benuamelayu Darat dengan luas wilayah 2,72 Km<sup>2</sup>
2. Kelurahan Benuamelayu Laut dengan luas wilayah 0,56 Km<sup>2</sup>
3. Kelurahan Parittokaya dengan luas wilayah 5,40 Km<sup>2</sup>
4. Kelurahan Kotabaru dengan luas wilayah 2,53 Km<sup>2</sup>
5. Kelurahan Akcaya dengan luas wilayah 3,24 Km<sup>2</sup>

Batas Wilayah Kecamatan Pontianak Selatan terdiri dari Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pontianak Kota, Sebelah Selatan berbatasan dengan Pontianak Tenggara, Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kapuas dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Punggur Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Kecamatan atau disebut juga dengan nama lain adalah bagian wilayah atau daerah kabupaten / kota yang dipimpin oleh Camat. Sedangkan Kelurahan

adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Daerah. Dalam melakukan pembangunan di wilayah Kecamatan tidak lepas dari peranan masyarakat yang sangat diharapkan bekerjasama dengan pemerintah melalui program kerja pada Program Umum dan Program Pembangunan yang pendanaannya dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Pontianak Selatan

## **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kota Pontianak, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak

### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Tugas pokok Camat adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengkoordinasian upaya ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan Pontianak Selatan;
- 6) Pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau kelurahan;
- 7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan se-Kota Pontianak seperti yang terdapat dalam lampiran Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
  - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
  - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun Nama pejabat yang mengisi Jabatan pada struktur tersebut adalah sebagai berikut:

a. ***Camat***

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan, unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

*b. Sekretaris*

Bertugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

**1) Sub Bagian Umum dan Aparatur**

Bertugas memimpin, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan aparatur agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif.

**2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Bertugas melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk mengumpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan sesuai dengan prosedur berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna.

*c. Seksi Pemerintahan*

Bertugas melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan dan pelayanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan publikasi kegiatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif.

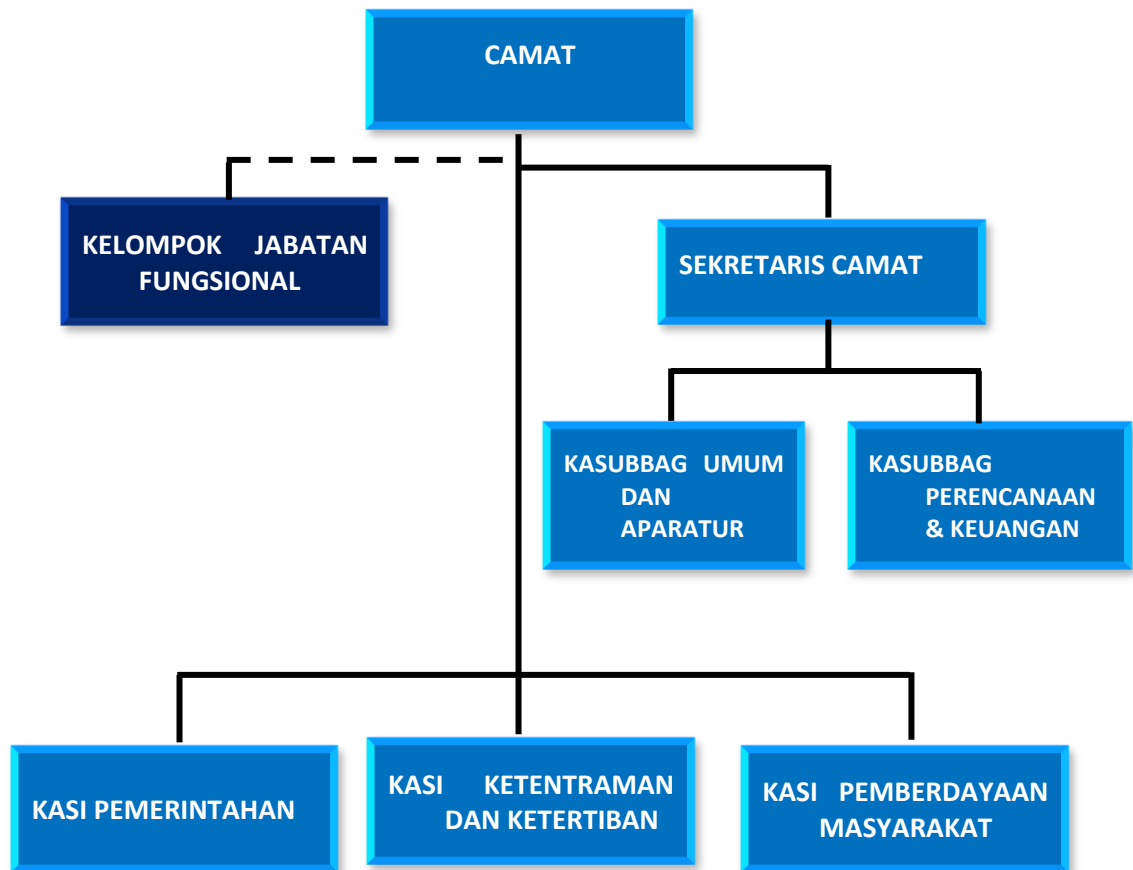
*d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat*

Bertugas Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pemberdayaan masyarakat, sesuai prosedur dan ketentuan berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

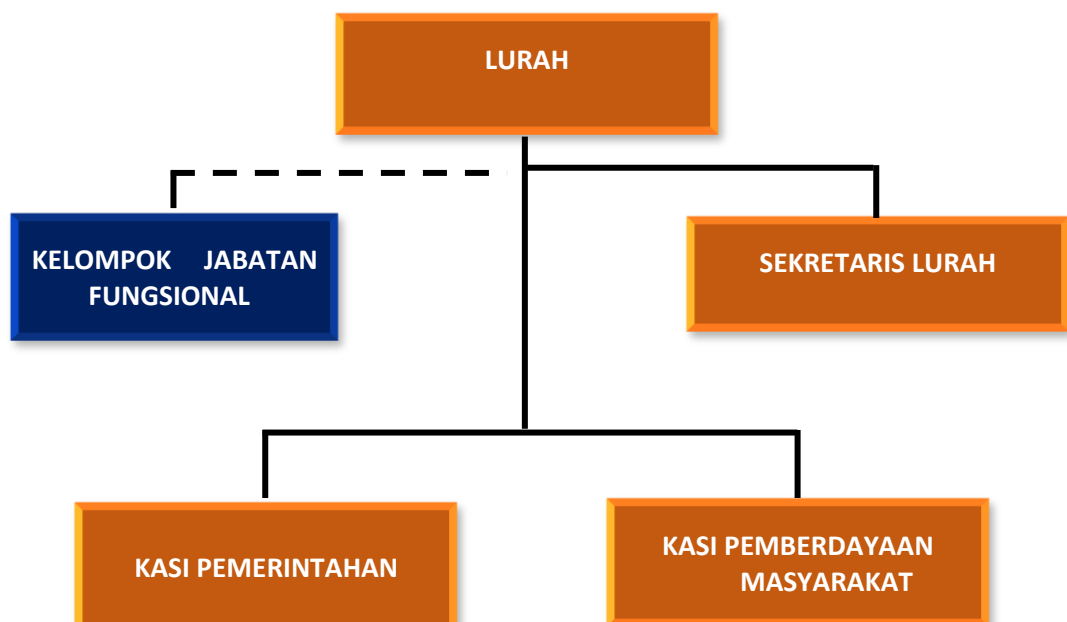
*e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban*

Bertugas merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas berjalan efektif dan efisien.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025**



**STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN PONTIANAK SEKATAN  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025**



### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 63 orang Aparatur Negeri Sipil, dan dapat dilihat pada perkembangan jumlah Aparatur Negeri Sipil Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	Tahun 2022	57 Orang	ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan
2.	Tahun 2023	57 orang	ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan
3.	Tahun 2024	55 Orang	ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan
4.	Tahun 2025	63 Orang	ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan

**TABEL.2.1.2.1**

**JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG TAHUN 2025 – 2029**

No.	Gol.Kepangkatan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Golongan IV	2	2	2	1	2	2
2.	Golongan III	43	39	39	41	49	49
3.	Golongan II	15	13	13	12	5	5
4.	Golongan I	1	3	3	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada **Tabel 2.2.1.** , sedangkan daftar norminatif berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada **Tabel. 2.2.2** sebagai berikut:

**TABEL 2.1.2.2**  
**DAFTAR NOMINATIF APARATUR SIPIL NEGARA**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Tingkat Pendidikan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tamatan S – 2	7	7	7	7	8	8
2.	Tamatan S – 1	18	19	18	19	35	35
3.	Tamatan D – III	7	6	7	6	8	8
4.	Tamatan SLTA/Sederajat	28	24	24	16	4	4
5.	Tamatan SLTP/Sederajat	1	1	1	-	-	-
6.	Tamatan SD/Sederajat	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>61</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kecamatan Pontianak Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, yaitu tahun 2024-2026. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan**  
**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perencanaan Pembangunan Kecamatan	-	-	-	82,00%	-	-	-	-	82,00%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
2	IKM Kecamatan	-	-	-	Baik	-	-	-	-	Baik	-	-	-	-	Sangat Baik	-	-	-	-
3	Banyaknya Ormas Yang Terlibat Dalam Penurunan Angka Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	80,00%	-	-	-	-	82,00%	-	-	-	-	102,50%	-	-	-	-
4	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penegakan Perda dan Perwa Yang Diselesaikan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	60%	-	-	-	-	60,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-

**Tabel 2.3.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan**  
**Tahun 2021-2024**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
1	Indeks Infrastruktur Permukiman Terdiri dari Indeks Jalan Lingkungan dan Drainase	-	-	-	-	90,00%	90,00%	90,00%	92,00%	-	90,00%	90,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-
2	Persentase Layanan Administrasi Kecamatan yang Telah Sesuai SOP dan Tepat Waktu	-	-	-	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-
3	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kemasyarakatan	-	-	-	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-
4	Persentase Lembaga dan Kelompok Masyarakat yang Aktif	-	-	-	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-
5	Persentase Rekomendasi Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-

a. **Peningkatan Pelayanan Prima**

Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Selatan mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2019, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan dikelurahan

b. **Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM dilaksanakan se semester setiap tahunnya, dengan cara menyebarkan kuesioner SKM sebagai tolok ukur penilaian terhadap pelayanan Kecamatan. Adapun tujuan utama dalam pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan. Melalui pengukuran SKM berkala akan diperoleh peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat SKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan.

Untuk indikator kinerja kegiatan, berupa rata-rata peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima yang dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Prima. Kegiatan ini diarahkan untuk mengukur peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima dan dilakukan melalui pengukuran survey kepuasan masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan terhadap 9 unsur pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Pontianak Selatan dengan cara menyebarkan kuesioner SKM kepada masyarakat penerima layanan. Maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel. 2.3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Pontianak Selatan**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	9.220.704.031	9.402.999.685	8.906.452.023	10.107.679.220	-	9.068.246.828	9.263.271.829	-	-	-	98%	98.5%	-	-		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	42.276.230	90.831.920	810.883.000	782.875.000	-	37.743.940	78.741.150	-	-	-	89%	86.7%	-	-		
3	Program Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	333.005.596	646.283.196	1.490.820.880	2.149.334.780	-	329.175.213	625.673.863	-	-	-	99%	96.8%	-	-		
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	332.528.532	175.270.000	81.130.000	121.130.000	-	326.420.339	174.445.000	-	-	-	98%	99.5%	-	-		
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	288.625.119	382.405.025	443.271.700	543.000.000	-	286.871.624	354.010.405	-	-	-	99%	92.6%	-	-		

### c. **Kelompok Sasaran Layanan**

Bagian ini menunjukkan Kelompok Sasaran Layanan di Kecamatan Pontianak Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, yaitu Tahun 2020-2024 adalah Masyarakat yang berada di 5 (lima ) Kelurahan yaitu Kelurahan Parittokaya, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Benua Melayu Darat dan Kelurahan Melayu Laut serta pelayanan 1 (satu) pintu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak yang berada di Kecamatan Pontianak Selatan.

Selain Pelayanan kedinasan Kecamatan Pontianak Selatan juga berkerjasama dengan Komaril, Polsek, Babin dan Babin Kantibmas untuk pelayanan ketentraman dan ketertiban di mana setiap kegiatan selalu melibatkan mereka baik segi keamanan ataupun berbentuk data untuk pelaporan yang diperlukan.

#### 2.1.4. **Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pontianak Selatan, maka di lengkapi sarana dan prasarana. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak adalah sebagai berikut berikut:

##### a. **Gedung Kantor**

Gedung kantor Kecamatan Pontianak Selatan terdiri dari Kantor Camat dan 5 (lima) kantor lurah, sebagai berikut :

- 2) Kantor Camat Pontianak Selatan telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Nirbaya Gang Mentari Kelurahan Kotabaru.
- 3) Kantor Lurah Benua melayu Darat telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Dr. Setia Budi Kelurahan Benuamelayu Darat.
- 4) Kantor Lurah Benuamelayu Laut telah menempati gedung Kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjungpura Gg. Irian Kelurahan Benuamelayu Laut.
- 5) Kantor Lurah Parittokaya telah menempati gedung sendiri yang terletak di
- 6) Jalan Letjen Sutoyo Kelurahan Parittokaya.

- 7) Kantor Lurah Kotabaru telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Kurnia Kelurahan Kotabaru.
- 8) Kantor Lurah Akcaya telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jl. Karya Bhakti Kelurahan Akcaya.

b. Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor Lainnya

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, sebagai berikut:

**Tabel 2.1.4.1 Tabel Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor  
Kecamatan Pontianak Selatan**

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Rak Arsip Kayu	8	3		5	
2	Lemari Arsip	1			1	
3	Meja Kerja	42	29		13	
4	Mesin Tik	3	1		2	
5	Tape Karaoke	1			1	
8	Brankas	1	1			
9	Meja Kerja Direksi	10	8	2		
10	Filling Cabinet	12	9	1	2	
11	Lemari Besi	13	12	1		
12	Lemari Penyimpanan	1			1	
12	Kipas Angin	22	8	2	12	
13	Bufet	1	1			
14	Kursi Putar Direksi	7	5	2		
15	Kursi Putar Fotany	5	2	2	2	
16	Komputer /Monitor	18	12	2	4	
17	Meja Komputer	5	2	2	1	
18	Keyboard	15	15			
19	UPS / CPU	13	13			
20	Printer	18	12		6	
21	Kursi Kerja Folaris	39	39			
22	Kursi Rapat Nila.	100	98		2	
23	Kaca Hias	1	1			
24	Dispenser	1		1		
25	Kursi Tamu Sudut	1	1	1		
26	Televisi	2	2			
27	AC	6	4		2	
28	Orden	6 Set	1 set		5 Set	
29	Meja & Kursi Tamu Jati	3 Set	2 set	1 Set		
30	Meja Rapat	1	1			
31	Kursi Kerja Futura	38	38			
32	Laptop	5	3	2		
33	Genset	2	2			
34	Infokus	2	1	1		
35	Rak Besi	4	3		1	
36	Papan Data Bezeting	1	1			
37	Mobil	1	1			
38	Motor	1			1	
39	Papan Data	10	10			
40	Layar Proyektor	1	1			
41	Tangki Air	1			1	
42	Rak Buku TV/Kembang	1	1			
43	Tabung Gas	1	1			
44	Kompor Gas	1	1			
45	Lemari Es	1	1			
46	Rak Piring	1	1			
47	Mickropon	2			2	
48	Dispenser	1		1		
49	Lemari Besi	9	5	4		

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
50	Papan Visual	1	1			
51	Mesin Absen	1	1			
52	Mesin Tebas	2	1		1	
53	Meja Resepsion/Meja Pelayanan	1	1			
54	Podium	1	1			

Sedangkan perkembangan sarana pendukung pada Kantor Camat Pontianak Selatan adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.1.4.2**  
**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN**  
**KECAMATAN PONTIANAK SELATAN TAHUN 2024**

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Gedung Kantor	1 Unit	Baik	
2	Ruang Camat	1 Ruang	Baik	
3	Ruang Sekcam	1 Ruang	Baik	
4	Ruang Kasubbag Umum dan Aparatur	1 Ruang	Baik	
5	Ruang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.	1 Ruang	Baik	
6	Ruang Kasi-Kasi	3 Ruang	Baik	
7	Ruang PKK	1 Ruang	Baik	
8	Ruang Pertemuan	1 Ruang	Baik	
9	WC/Toilet	6 Ruang	Baik	
10	Area Parkir	1 Lokasi	Baik	
11	Dapur	1 Ruang	Baik	
12	Mushalla	1 Ruang	Baik	
13	PLKB & Capil	1 Ruang	Baik	
14	Loket Pelayanan	1 Ruang	Baik	

*sumber: Sekretariat Kecamatan Pontianak Selatan 2024*

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis**

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

#### **a. Aspek Geografis**

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota Pontianak terbagi menjadi 6 kecamatan, yakni Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara. Kecamatan Pontianak Selatan memiliki luas wilayah 1.445 Ha atau sekitar 13,49 % dari luas Kota Pontianak, dengan rata – rata suhu udara berkisar antara 26<sup>0</sup> C sampai dengan 27<sup>0</sup> C, dengan kelembapan udara sekitar 86% - 92%. Curah hujan berkisar antara 3.000 mm – 4.000 mm per tahun dan tinggi daratan 0,10 – 1,5 m di atas permukaan laut. Kondisi tersebut mengakibatkan di beberapa wilayah Kecamatan Pontianak Selatan rawan banjir pada saat air pasang laut yang disertai hujan. Apabila sistem drainase yang dibangun kurang baik maka upaya mengatasi wilayah rawan banjir menjadi terhambat akibatnya waktu yang diperlukan oleh air untuk surut menjadi lebih lama. Beberapa sungai/parit di Kecamatan Pontianak Selatan, yaitu Parit Besar, Parit Tokaya, Parit Bansir, dan Sungai Kapuas Besar, menjadi bagian dari sistem drainase yang dibangun dan dijaga kelancaran aliran airnya. Wilayah ini dihuni penduduk sebanyak 96.576 jiwa (Laporan Kependudukan Tahun 2018) dan jumlah Kepala Keluarga 22.874 KK.

Adapun luas administrasi Kecamatan Pontianak Selatan yang terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Benuamelayu Darat dengan luas wilayah 2,72 Km<sup>2</sup>
2. Kelurahan Benuamelayu Laut dengan luas wilayah 0,56 Km<sup>2</sup>

3. Kelurahan Parittokaya dengan luas wilayah 5,40 Km<sup>2</sup>
4. Kelurahan Kotabaru dengan luas wilayah 2,53 Km<sup>2</sup>
5. Kelurahan Akcaya dengan luas wilayah 3,24 Km<sup>2</sup>

Batas Wilayah Kecamatan Pontianak Selatan terdiri dari Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pontianak Kota, Sebelah Selatan berbatasan dengan Pontianak Tenggara, Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kapuas dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Punggur Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya.

**b. Aspek Sosial Kemasyarakatan**

Penduduk Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah pada tahun 2020 berjumlah 93.302 jiwa dengan proporsi pria 46.407 jiwa dan wanita 46.895 jiwa. Dengan jumlah KK 27.395 KK dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Kecamatan Pontianak Selatan termasuk cukup harmonis dalam budaya dan agamanya. Dengan semakin banyaknya penduduk pendatang, sikap mental dan tingkat kepedulian warga masyarakat atas lingkungannya perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja bakti dan kegiatan gotong royong lainnya. Untuk mengantisipasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah atau angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, perlu adanya pembinaan/pelatihan ketrampilan.

**c. Aspek Pelayanan Umum**

Permasalahan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak ditinjau dari aspek pelayanan umum di antaranya adalah:

**1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan**

Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ditambah dengan rendahnya kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah masih terbatas.

**2. Kinerja Pelayanan Pendidikan**

Dari sisi pelayanan pendidikan, jumlah sebaran dan daya tampung sekolah negeri cukup memadai, terdapat 15 SD negeri, 7 SMP negeri dan 7 SMA/SMK Negeri di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan, dan sekolah swasta yang

berjumlah 13 SD, 9 SMP dan 13 SMA/SMK Swasta di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan.

### 3. Kinerja Pelayanan Kesehatan

Untuk pelayanan kesehatan, jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat cukup proporsional terhadap jumlah dan kepadatan penduduk baik di level posyandu maupun Puskesmas, terdapat 1 (satu) UPTD Puskesmas (24 jam) yang dapat bersiaga penuh dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan 1 UPK Puskesmas Purnama.

#### 2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah di masa yang akan datang. Memperhatikan kajian permasalahan berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada renstra, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan perangkat daerah serta memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu kepada RPD Kota Pontianak, maka diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2025-2029, sebagai berikut :

- a. Pengelola Keuangan Daerah Perlu mendapatkan perhatian dalam aspek pengelolaan keuangan adalah tata kelola aset-aset daerah dalam hal ini Tata kelola aset ini menyangkut aspek manajemen data dan informasi aset-aset yang ada serta optimalisasi pemanfaatannya bagi pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Pelayanan Publik terdiri :
  - Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan umum perlu ditingkatkan.
  - Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan.
  - Daya dukung infrastruktu pelayanan public perlu ditingkatkan (Kantor Camat dan Kelurahan)
- a. Kemiskinan ekstrem dimana Kecamatan / Kelurahan menjadi lokus penanggulangan kemiskinan ekstrim.
- b. Perubahan Iklim perlu adanya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim (ketahanan iklim)
- c. Stunting dimana prioritas penanganan stunting di masing-masing kelurahan khususnya yang ditetapkan pada lokus stunting.

- d. Kesehatan dimana Kecamatan Pontianak Selatan mengelimansi HIV/AIDS, TBC dan malaria pada tahun 2030
- e. Sarana Pendidikan belum terpenuhinya sarana Pendidikan yang sesuai dengan standar.
- f. Kelembagaan Masyarakat yaitu rendahnya kapaitas dan peran Lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
- g. Sektor Pedagang Informasi (PKL) adalah :
  - Penataan perdagangan kaki lima (PKL)
  - Ketertiban tokoh masyarakat agar sering dilakukan untuk koordinasi
  - Perlu penataan terhadap jalan akses masuk, ketertiban pedagang informal maupun areal parkir di wilayah waterfront
  - Penataan Kembali beberapa taman bermain dan ruang terbuka hijau
  - Peningkatan Fasilitas Ekonomi Keratif
  - Penggalan potensi kecamatan di bidang pariwisata dan ekonomi
- h. Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - Rendahnya cakupan layanan persampahan
  - Masih kurangnya kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
  - Meningkatnya jumlah penduduk dan perumahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau
- i. Peningkatan infrastruktur jalan, drainase dan fasilitas umum di Kecamatan dimana penyaluran material di wilayah yang belum oleh Perangkat Daerah Teknis,
- j. Kepadatan jumlah penduduk dimana tidak meratanya sebaran penduduk disetiap kecamatan.

Analisis lingkungan strategis meliputi dua area analisis yaitu: eksternal yang berguna untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi kedepan; internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki sebagai modal untuk mencapai mimpi masa depan yang dicita-citakan.

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi

Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna.

Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 2.2.2.1.**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis**  
**Kecamatan Pontianak Selatan**  
**Tahun 2025-2029**

No.	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	* Dinas Kesehatan	- Kekerasan Terhadap Anak	- Penanganan Stunting anak			√	Permasalahan Anak
		- Kenakalan Remaja	- Skrining Kesehatan Anak Kelas 1-7			√	
		- Kesehatan Anak	- Integrasi Layanan Primer			√	
			- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			√	
			- Lingkungan Bersih dan Sehat			√	

No.	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	*Dinas Kepemudaan dan Olahraga		- Memfasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda			√	
			- Memfasilitasi Penyelenggaraan Minat dan Bakat Anak			√	
	* Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		- Pendampingan Psikologis Trauma kekerasan Terhadap Anak			√	
			- Data Terkait Keluarga			√	
			- Pembinaan Forum Anak, Bunda Paud, Posyandu, PKK, RT/RW, Lomba Kelurahan			√	
	* Dinas Pendidikan		- Pembinaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Disekolah			√	
			- Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan Untuk Orang Miskin			√	
	* Dinas Sosial		- Penanganan Disabilitas Sosial, Anak Terlantar, dan Tuna Sosial			√	

No.	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			- Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			√	
2.	* Dinas Komunikasi Dan Informatika	- Pusat Kuliner	- Promosi Pusat Kuliner dan Waterfront City			√	Pusat Perdagangan
	* Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	- Wisata Waterfront	- Pengembangan Pemasaran UMKM			√	
		- Pelaku UMKM dengan Skala Kecil	- Labeling Produk Halal			√	
			- Pembinaan Produk UMKM			√	
			- Pembinaan Keberlanjutan Usaha PKL			√	
			- Penekanan Inflasi			√	
	* Dinas Tenaga Kerja		- Pelatihan Usaha Untuk Masyarakat			√	
			- Memfasilitasi Tenaga Kerja Untuk Keluar Negeri			√	
	* Dinas Pariwisata		- Promosi Wisata Waterfront			√	
			- Pembinaan Kawasan Wisata Waterfront			√	
3.	* Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	- Fasilitas Genangan Air	- Pembangunan Turap Parit Diperumahan			√	Permasalahan lingkungan
		- Fasilitas Penerangan Jalan	- Pembangunan Jalan Lingkungan			√	

No.	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Fasilitasi Kebersihan Parit	- Pembangunan Bantuan Rumah Layak Huni			√	
	* Dinas Pekerjaan Umum	- Fasilitasi Drainase Tidak Terhubung	- Pembangunan Turap Di Drainase			√	
		- Fasilitasi Kebakaran Lahan	- Pemeliharaan Drainase			√	
		- Fasilitasi Pembangunan RUK Tidak Sesuai Dengan GSB	- Penertiban Ruko Tidak Sesuai Dengan GSB			√	
	* Dinas Sosial		- Pemeliharaan Taman			√	
			- Memberikan Bantuan Kepada Korban Bencana Putting Beliung			√	
	* Badan Penanggulangan Bencana Daerah		- Penanganan Kebakaran Lahan			√	
			- Penanganan Evakuasi Bencana Putting Beliung			√	
	* Satuan Polisi Pamong Praja		- Penertiban Pedagang Kaki Lima			√	
			- Penertiban Pembangunan Ruko di Tepi Jalan			√	
	* Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan		- Penanganan Petani Yang Berpindah Pindah Ladang Menyebabkan Kebakaran Lahan			√	
			- Pembinaan Petani, Peternak dan			√	



**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, RENCANA STRATEGIS**

**3.1. Tujuan dan Sasaran**

Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang juga memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra). Berdasarkan paparan Visi dan Misi serta penjabaran Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 Kota Pontianak, selanjutnya Kecamatan Pontianak Kota merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak.

3.1. Tujuan dan Sasaran , Indikator Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun			
				2026	2027	2028	2029
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pontianak Selatan		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pontianak Selatan	3,72	3,73	3,74	3,75
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dikecamatan Pontianak Selatan	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan	86,3	86,45	86,6	86,75
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Selatan	86,1	86,2	86,3	86,4

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam renstra 2025-2029. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas Renstra yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra 2025-2029 selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Renstra 2025-2029 yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pontianak Selatan dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Bagian ini menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi renstra 2025-2029 periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Pontianak Selatan. Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Strategi yang telah dirumuskan kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan perencanaan strategis disusun

melalui pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang harus dihadapi perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN</b>											
- Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Selatan		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pontianak Selatan (Indeks)	-	3.71	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Selatan (Nilai)	-	86	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan (Nilai)	-	86.15	86.3	86.45	86.6	86.75	86.9	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN PARIT TOKAYA</b>											
			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pontianak Selatan (Indeks)	-	3.71	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Selatan (Nilai)	-	86	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan (Nilai)	-	86.15	86.3	86.45	86.6	86.75	86.9	

**7.01.0.00.0.00.03.0002 - KELURAHAN AKCAYA**

			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pontianak Selatan (Indeks)	-	3.71	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Selatan (Nilai)	-	86	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan (Nilai)	-	86.15	86.3	86.45	86.6	86.75	86.9	

**7.01.0.00.0.00.03.0003 - KELURAHAN KOTABARU**

			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pontianak Selatan (Indeks)	-	3.71	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Selatan (Nilai)	-	86	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan (Nilai)	-	86.15	86.3	86.45	86.6	86.75	86.9	

**7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pontianak Selatan (Indeks)	-	3.71	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Selatan (Nilai)	-	86	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan (Nilai)	-	86.15	86.3	86.45	86.6	86.75	86.9	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT</b>											
			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pontianak Selatan (Indeks)	-	3.71	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Selatan (Nilai)	-	86	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan (Nilai)	-	86.15	86.3	86.45	86.6	86.75	86.9	

Dalam Proses Penyusunan Rencana Strategis, Penahapan Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dituangkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak selatan Kota Pontianak**

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Pelatihan , Pengembangan dan Penguatan SDM Petugas Pelayanan Publik	Pemantapan Infrastruktur, sarana dan prasarana Terhadap Pelayanan Publik	Pelatihan Keterampilan dan Optimalisasi Organisasi Masyarakat	Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pontianak Selatan yang Efektif, Efisien, Inovatif, Kreatif serta Berkelanjutan

Arah Kebijakan Kecamatan Pontianak Selatan Merupakan Pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Berikut Teknik Merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagai Berikut :

**Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak**

<b>No</b>	<b>Operasionalisasi NSPK</b>	<b>Tahun</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pontianak Selatan</b>	<b>Ket</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	2026	Penyederhanaan Regulasi dan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Merit Sistem.	Pemanfaatan Teknologi digital untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik	
		2027	Harmonisasi Regulasi Penerapan Prinsip Good Governance dan pengembangan interoperabilitas Data dan Sistem Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan	Penyelarasan regulasi Pengembangan Pemerintahan Pelayanan Publik	

			Publik, Penguatan Kompetensi ASN untuk Penerapan Good Governance		
		2028	Peningkatan Kualitas Regulasi, Pemanfaatan Internet Of Things (IOT), Artificial Intelligence dan Big Data Analytics dalam Penerapan Good Governance	Pemanfaatan Teknologi dalam Pemerintahan	
		2029	Pemantapan Good Governance	Peningkatan Kualitas pelayanan Publik dalam tata pemerintahan yang baik	
		2030	Memperluas pemanfaatan Internet of Things (IOT), Artificial Intelligence, dan Big Data Analitics dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Memperluas Pemanfaatan Teknologi dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 meliputi:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Sasaran Program : Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan

**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- e. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
- f. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah

**Kegiatan : Administrasi Keuangan**

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SK\PD
- e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- f. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

**Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD

**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c. Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Sasaran Program : Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

**Sub Kegiatan :**

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Sasaran Program : Persentase keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan.

**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

**Sub Kegiatan :**

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

**Sub Kegiatan :**

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- b. Pembangunan Srana Dan Prasarana Kelurahan
- c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- d. Evaluasi Kelurahan

**Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**

**Sub Kegiatan :**

- a. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar – Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
- b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah sehat dan Layak huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
- c. Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan derajat kesejahteraan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup bersih dan Sehat.
- d. Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
- e. Penumbuhan dan Peningkatahn Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas.

**4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan  
 Indikator Sasaran Program : Persentase Koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

**Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Sasaran Program : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pontianak Selatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 4.3

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				12.530.502.854,00		12.502.555.451,00		12.522.788.304,00		12.675.922.219,00		13.112.543.185,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.635.322.784,00		10.629.525.671,00		10.626.789.604,00		10.600.311.119,00		10.710.020.785,00		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan	95	100	10.635.322.784,00	100	10.629.525.671,00	100	10.626.789.604,00	100	10.600.311.119,00	100	10.710.020.785,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.318.600,00		80.869.000,00		75.708.600,00		75.708.600,00		75.708.600,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	2.775.000,00	0	2.913.000,00	0	2.775.000,00	0	2.775.000,00	0	2.775.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	12.980.000,00	0	12.980.000,00	0	12.980.000,00	0	12.980.000,00	0	12.980.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	4.300.000,00	0	4.300.000,00	0	4.300.000,00	0	4.300.000,00	0	4.300.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	46.263.600,00	0	46.676.000,00	0	41.653.600,00	0	41.653.600,00	0	41.653.600,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				46.263.600,00		46.676.000,00		41.653.600,00		41.653.600,00		41.653.600,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	46.263.600,00	0	46.676.000,00	0	41.653.600,00	0	41.653.600,00	0	41.653.600,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.775.000,00		2.913.000,00		2.775.000,00		2.775.000,00		2.775.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	2.775.000,00	0	2.913.000,00	0	2.775.000,00	0	2.775.000,00	0	2.775.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12.980.000,00		12.980.000,00		12.980.000,00		12.980.000,00		12.980.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	12.980.000,00	0	12.980.000,00	0	12.980.000,00	0	12.980.000,00	0	12.980.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.300.000,00		4.300.000,00		4.300.000,00		4.300.000,00		4.300.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	4.300.000,00	0	4.300.000,00	0	4.300.000,00	0	4.300.000,00	0	4.300.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.744.765.733,00		8.870.478.402,00		8.641.747.282,00		8.473.780.282,00		8.652.850.282,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	12	2.508.970,00	12	2.630.000,00	12	2.508.970,00	12	2.508.970,00	12	2.508.970,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	60	8.074.125.853,00	60	8.197.913.402,00	60	7.971.107.402,00	60	7.803.140.402,00	60	7.982.210.402,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	12	27.460.000,00	12	28.883.000,00	12	27.460.000,00	12	27.460.000,00	12	27.460.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	12	633.120.000,00	12	633.120.000,00	12	633.120.000,00	12	633.120.000,00	12	633.120.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	18	7.552.910,00	18	7.930.000,00	18	7.552.910,00	18	7.552.910,00	18	7.552.910,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.074.125.853,00		8.197.913.402,00		7.971.107.402,00		7.803.140.402,00		7.982.210.402,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	60	8.074.125.853,00	60	8.197.913.402,00	60	7.971.107.402,00	60	7.803.140.402,00	60	7.982.210.402,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				633.120.000,00		633.120.000,00		633.120.000,00		633.120.000,00		633.120.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	12	633.120.000,00	12	633.120.000,00	12	633.120.000,00	12	633.120.000,00	12	633.120.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				27.460.000,00		28.883.000,00		27.460.000,00		27.460.000,00		27.460.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	12	27.460.000,00	12	28.883.000,00	12	27.460.000,00	12	27.460.000,00	12	27.460.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.506.970,00		2.630.000,00		2.506.970,00		2.506.970,00		2.506.970,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	12	2.506.970,00	12	2.630.000,00	12	2.506.970,00	12	2.506.970,00	12	2.506.970,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.552.910,00		7.930.000,00		7.552.910,00		7.552.910,00		7.552.910,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	18	7.552.910,00	18	7.930.000,00	18	7.552.910,00	18	7.552.910,00	18	7.552.910,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				16.925.000,00		17.769.500,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	4.450.000,00	1	4.672.500,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	2	4.125.000,00	2	4.331.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1	4.175.000,00	1	4.383.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1	4.175.000,00	1	4.383.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4.450.000,00		4.672.500,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	4.450.000,00	1	4.672.500,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4.125.000,00		4.331.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	2	4.125.000,00	2	4.331.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.175.000,00		4.383.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1	4.175.000,00	1	4.383.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.175.000,00		4.383.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1	4.175.000,00	1	4.383.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				271.235.000,00		272.225.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terpenuhinya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	1	10.400.000,00	1	10.920.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	1	9.400.000,00	1	9.870.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	184	151.435.000,00	184	151.435.000,00	184	180.000.000,00	184	180.000.000,00	184	180.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				151.435.000,00		151.435.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	184	151.435.000,00	184	151.435.000,00	184	180.000.000,00	184	180.000.000,00	184	180.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9.400.000,00		9.870.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	1	9.400.000,00	1	9.870.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.400.000,00		10.920.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	1	10.400.000,00	1	10.920.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				273.130.000,00		276.955.000,00		216.110.000,00		216.110.000,00		216.110.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terpenuhnya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	1	35.000.000,00	1	36.510.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1	12.000.000,00	1	12.455.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	12	75.000.000,00	12	76.860.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	3	68.130.000,00	3	68.130.000,00	3	44.110.000,00	3	44.110.000,00	3	44.110.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000,00		12.455.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1	12.000.000,00	1	12.455.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000,00		25.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000,00		76.880.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	12	75.000.000,00	12	76.880.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				35.000.000,00		36.510.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	1	35.000.000,00	1	36.510.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.130.000,00		68.130.000,00		44.110.000,00		44.110.000,00		44.110.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	3	68.130.000,00	3	68.130.000,00	3	44.110.000,00	3	44.110.000,00	3	44.110.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				350.000.000,00		190.000.000,00		270.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	350.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	15	190.000.000,00	15	270.000.000,00	15	400.000.000,00	15	400.000.000,00	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				350.000.000,00		-		-				-	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	350.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		190.000.000,00		270.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	15	190.000.000,00	15	270.000.000,00	15	400.000.000,00	15	400.000.000,00	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				840.818.451,00		880.594.769,00		917.883.722,00		929.372.237,00		880.011.903,00	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	12	201.523.910,00	12	232.220.228,00	12	278.589.181,00	12	290.077.696,00	12	220.717.362,00	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	12	639.294.541,00	12	628.374.541,00	12	639.294.541,00	12	639.294.541,00	12	639.294.541,00	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				201.523.910,00		232.220.228,00		278.589.181,00		290.077.696,00		220.717.362,00	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	12	201.523.910,00	12	232.220.228,00	12	278.589.181,00	12	290.077.696,00	12	220.717.362,00	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				639.294.541,00		628.374.541,00		639.294.541,00		639.294.541,00		639.294.541,00	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	12	639.294.541,00	12	628.374.541,00	12	639.294.541,00	12	639.294.541,00	12	639.294.541,00	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.130.000,00		60.636.000,00		61.340.000,00		61.340.000,00		61.340.000,00	7.01.00.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	27	20.300.000,00	27	21.315.000,00	27	18.750.000,00	27	18.750.000,00	27	18.750.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	2	37.830.000,00	2	39.321.000,00	2	42.590.000,00	2	42.590.000,00	2	42.590.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				37.830.000,00		39.321.000,00		42.590.000,00		42.590.000,00		42.590.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	2	37.830.000,00	2	39.321.000,00	2	42.590.000,00	2	42.590.000,00	2	42.590.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.300.000,00		21.315.000,00		18.750.000,00		18.750.000,00		18.750.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	27	20.300.000,00	27	21.315.000,00	27	18.750.000,00	27	18.750.000,00	27	18.750.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah				10.635.322.784,00		10.629.525.871,00		10.628.789.804,00		10.600.311.119,00		10.710.020.785,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				273.130.000,00		276.955.000,00		216.110.000,00		216.110.000,00		216.110.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	3	5.800.000,00	3	7.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1	3.000.000,00	1	4.200.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	2	8.000.000,00	2	10.500.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	4.000.000,00	1	4.725.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	3	10.500.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.000.000,00		4.200.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1	3.000.000,00	1	4.200.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	3	10.500.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000,00		4.725.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	4.000.000,00	1	4.725.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.000.000,00		10.500.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	2	8.000.000,00	2	10.500.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.800.000,00		7.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	3	5.800.000,00	3	7.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.130.000,00		60.636.000,00		61.340.000,00		61.340.000,00		61.340.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	1	5.080.000,00	1	4.725.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	6	8.120.000,00	6	9.030.000,00	6	7.600.000,00	6	7.600.000,00	6	7.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.080.000,00		4.725.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	1	5.080.000,00	1	4.725.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.120.000,00		9.030.000,00		7.600.000,00		7.600.000,00		7.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	6	8.120.000,00	6	9.030.000,00	6	7.600.000,00	6	7.600.000,00	6	7.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah				10.635.322.784,00		10.629.525.671,00		10.626.789.604,00		10.600.311.119,00		10.710.020.785,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				273.130.000,00		276.965.000,00		216.110.000,00		216.110.000,00		216.110.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	6	3.000.000,00	6	4.725.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	7.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	2	6.400.000,00	2	10.500.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1	3.500.000,00	1	4.200.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.500.000,00		4.200.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1	3.500.000,00	1	4.200.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	7.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000,00		4.725.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	6	3.000.000,00	6	4.725.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.400.000,00		10.500.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	2	6.400.000,00	2	10.500.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.500.000,00		7.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.130.000,00		60.836.000,00		61.340.000,00		61.340.000,00		61.340.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	1	2.600.000,00	1	4.725.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	11	6.000.000,00	11	9.030.000,00	11	7.600.000,00	11	7.600.000,00	11	7.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2.600.000,00		4.725.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	1	2.600.000,00	1	4.725.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000,00		9.030.000,00		7.600.000,00		7.600.000,00		7.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	11	6.000.000,00	11	9.030.000,00	11	7.600.000,00	11	7.600.000,00	11	7.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah				10.635.322.784,00		10.629.525.671,00		10.626.789.604,00		10.600.311.119,00		10.710.020.785,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				273.130.000,00		276.955.000,00		216.110.000,00		216.110.000,00		216.110.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1	2.010.400,00	1	4.200.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	5	9.938.500,00	5	10.500.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	1	1.930.000,00	1	7.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	2.272.800,00	1	4.725.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.010.400,00		4.200.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1	2.010.400,00	1	4.200.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.272.800,00		4.725.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	2.272.800,00	1	4.725.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.938.500,00		10.500.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	5	9.938.500,00	5	10.500.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.930.000,00		7.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	1	1.930.000,00	1	7.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.130.000,00		60.636.000,00		61.340.000,00		61.340.000,00		61.340.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	10	4.060.000,00	10	9.660.000,00	10	7.600.000,00	10	7.600.000,00	10	7.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	1	3.760.000,00	1	3.948.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3.760.000,00		3.948.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	1	3.760.000,00	1	3.948.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.060.000,00		9.660.000,00		7.600.000,00		7.600.000,00		7.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	10	4.060.000,00	10	9.660.000,00	10	7.600.000,00	10	7.600.000,00	10	7.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah				10.635.322.784,00		10.629.525.671,00		10.626.789.804,00		10.600.311.119,00		10.710.020.785,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				273.130.000,00		276.955.000,00		216.110.000,00		216.110.000,00		216.110.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	3.902.700,00	1	4.725.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	6	3.059.200,00	6	4.200.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	3	6.116.000,00	3	7.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	5	19.857.200,00	5	10.500.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.059.200,00		4.200.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	6	3.059.200,00	6	4.200.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.902.700,00		4.725.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	3.902.700,00	1	4.725.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.857.200,00		10.500.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	5	19.857.200,00	5	10.500.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.116.000,00		7.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	3	6.116.000,00	3	7.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.130.000,00		60.636.000,00		61.340.000,00		61.340.000,00		61.340.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	-	1	3.948.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	3	5.480.000,00	3	7.885.000,00	3	7.600.000,00	3	7.600.000,00	3	7.600.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		3.948.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	-	1	3.948.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.480.000,00		7.885.000,00		7.600.000,00		7.600.000,00		7.600.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	3	5.480.000,00	3	7.885.000,00	3	7.600.000,00	3	7.600.000,00	3	7.600.000,00	7.01.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah				10.635.322.784,00		10.629.525.671,00		10.626.789.604,00		10.600.311.119,00		10.710.020.785,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				273.130.000,00		276.955.000,00		216.110.000,00		216.110.000,00		216.110.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	1	5.000.000,00	1	70.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	4.000.000,00	1	4.725.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	3.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1	1.000.000,00	1	4.200.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	1	6.000.000,00	1	10.500.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000,00		4.200.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1	1.000.000,00	1	4.200.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor				3.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Tersedianya Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	3.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000,00		4.725.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	4.000.000,00	1	4.725.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.000.000,00		10.500.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	1	6.000.000,00	1	10.500.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000,00		70.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	1	5.000.000,00	1	70.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.130.000,00		60.636.000,00		61.340.000,00		61.340.000,00		61.340.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	12	7.510.000,00	12	9.804.000,00	12	7.600.000,00	12	7.600.000,00	12	7.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4.000.000,00		4.000.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.510.000,00		9.804.000,00		7.600.000,00		7.600.000,00		7.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	12	7.510.000,00	12	9.804.000,00	12	7.600.000,00	12	7.600.000,00	12	7.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				8.354.200,00		8.771.910,00		9.400.000,00		9.500.000,00		9.600.000,00		
Peningkatan Persentase Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase penyelesaian layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	100	100	8.354.200,00	100	8.771.910,00	100	9.400.000,00	100	9.500.000,00	100	9.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				8.354.200,00		8.771.910,00		9.400.000,00		9.500.000,00		9.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
terlaksananya penilaian pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	14	8.354.200,00	14	8.771.910,00	14	9.400.000,00	14	9.500.000,00	14	9.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.354.200,00		8.771.910,00		9.400.000,00		9.500.000,00		9.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	14	8.354.200,00	14	8.771.910,00	14	9.400.000,00	14	9.500.000,00	14	9.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan Persentase Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan														7.01.00.00.03.00.01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
														7.01.00.00.03.00.02 - KELURAHAN AKCAYA	
														7.01.00.00.03.00.03 - KELURAHAN KOTABARU	
														7.01.00.00.03.00.04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
														7.01.00.00.03.00.05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.358.079.800,00		1.332.494.400,00		1.253.495.700,00		1.343.495.700,00		1.870.307.000,00			
Peningkatan Partisipasi Lembaga/Masyarakat	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang telah dilakukan	90	100	1.358.079.800,00	100	1.332.494.400,00	100	1.253.495.700,00	100	1.343.495.700,00	100	1.870.307.000,00		7.01.00.00.03.00.00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				193.934.000,00		203.630.700,00		167.863.600,00		167.863.600,00		167.863.600,00		7.01.00.00.03.00.00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
terselenggaranya koordinasi pemberdayaan pada tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	6	193.934.000,00	6	203.630.700,00	6	167.863.600,00	6	167.863.600,00	6	167.863.600,00		7.01.00.00.03.00.00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				193.934.000,00		203.630.700,00		167.863.600,00		167.863.600,00		167.863.600,00		7.01.00.00.03.00.00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	6	193.934.000,00	6	203.630.700,00	6	167.863.600,00	6	167.863.600,00	6	167.863.600,00		7.01.00.00.03.00.00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				256.544.700,00		259.777.600,00		264.896.000,00		264.896.000,00		232.107.300,00		7.01.00.00.03.00.00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
terselenggaranya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	5	64.658.000,00	5	67.890.900,00	5	132.788.700,00	5	132.788.700,00	5	100.000.000,00		7.01.00.00.03.00.00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0	2	191.886.700,00	2	191.886.700,00	2	132.107.300,00	2	132.107.300,00	2	132.107.300,00		7.01.00.00.03.00.00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				64.658.000,00		67.890.900,00		132.788.700,00		132.788.700,00		100.000.000,00		7.01.00.00.03.00.00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	5	64.658.000,00	5	67.890.900,00	5	132.788.700,00	5	132.788.700,00	5	100.000.000,00		7.01.00.00.03.00.00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				191.886.700,00		191.886.700,00		132.107.300,00		132.107.300,00		132.107.300,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0	2	191.886.700,00	2	191.886.700,00	2	132.107.300,00	2	132.107.300,00	2	132.107.300,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				907.601.100,00		889.086.100,00		820.736.100,00		910.736.100,00		1.270.336.100,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
terlaksananya pemberdayaan pada tingkat keluarga untuk menciptakan keluarga berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	0	206.944.200,00	0	206.944.200,00	0	206.944.200,00	0	206.944.200,00	0	206.944.200,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0	0	303.574.900,00	0	284.099.900,00	0	284.099.900,00	0	284.099.900,00	0	284.099.900,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0	60.487.500,00	0	60.897.500,00	0	60.897.500,00	0	130.897.500,00	0	300.497.500,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0	0	197.696.400,00	0	178.246.400,00	0	178.246.400,00	0	178.246.400,00	0	178.246.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	0	138.898.100,00	0	138.898.100,00	0	90.548.100,00	0	110.548.100,00	0	300.548.100,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				206.944.200,00		206.944.200,00		206.944.200,00		206.944.200,00		206.944.200,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	0	206.944.200,00	0	206.944.200,00	0	206.944.200,00	0	206.944.200,00	0	206.944.200,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				138.898.100,00		138.898.100,00		90.548.100,00		110.548.100,00		300.548.100,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	0	138.898.100,00	0	138.898.100,00	0	90.548.100,00	0	110.548.100,00	0	300.548.100,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				60.487.500,00		60.897.500,00		60.897.500,00		130.897.500,00		300.497.500,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0	60.487.500,00	0	60.897.500,00	0	60.897.500,00	0	130.897.500,00	0	300.497.500,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				303.574.900,00		284.099.900,00		284.099.900,00		284.099.900,00		284.099.900,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0	0	303.574.900,00	0	284.099.900,00	0	284.099.900,00	0	284.099.900,00	0	284.099.900,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				197.696.400,00		178.246.400,00		178.246.400,00		178.246.400,00		178.246.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0	0	197.696.400,00	0	178.246.400,00	0	178.246.400,00	0	178.246.400,00	0	178.246.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Peningkatan Partisipasi Lembaga/Masyarakat	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang telah dilakukan	0	0	1.358.079.800,00	0	1.332.494.400,00	0	1.253.495.700,00	0	1.343.495.700,00	0	1.670.307.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				256.544.700,00		259.777.600,00		264.896.000,00		264.896.000,00		232.107.300,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
terselenggaranya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	15	140.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	15	25.000.000,00	15	42.000.000,00	15	24.138.000,00	15	24.138.000,00	15	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	106	698.995.689,00	106	699.995.689,00	106	699.995.689,00	106	699.995.689,00	106	799.995.689,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25.000.000,00		42.000.000,00		24.138.000,00		24.138.000,00		30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	15	25.000.000,00	15	42.000.000,00	15	24.138.000,00	15	24.138.000,00	15	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				140.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	15	140.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				699.995.669,00		699.995.669,00		699.995.669,00		699.995.669,00		799.995.669,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	106	699.995.669,00	106	699.995.669,00	106	699.995.669,00	106	699.995.669,00	106	799.995.669,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Peningkatan Partisipasi Lembaga/Masyarakat				1.358.079.800,00		1.332.494.400,00		1.253.495.700,00		1.343.495.700,00		1.670.307.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				258.544.700,00		259.777.600,00		264.896.000,00		264.896.000,00		232.107.300,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
terselenggaranya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	96	751.800.000,00	96	757.800.000,00	96	757.800.000,00	96	757.800.000,00	96	755.800.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	1	100.000.000,00	1	120.750.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	70	25.000.000,00	70	31.500.000,00	70	25.333.900,00	70	25.333.900,00	70	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25.000.000,00		31.500.000,00		25.333.900,00		25.333.900,00		30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	70	25.000.000,00	70	31.500.000,00	70	25.333.900,00	70	25.333.900,00	70	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				100.000.000,00		120.750.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	1	100.000.000,00	1	120.750.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				751.800.000,00		757.800.000,00		757.800.000,00		757.800.000,00		755.800.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	96	751.800.000,00	96	757.800.000,00	96	757.800.000,00	96	757.800.000,00	96	755.800.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Peningkatan Partisipasi Lembaga/Masyarakat				1.358.079.800,00		1.332.494.400,00		1.253.495.700,00		1.343.495.700,00		1.670.307.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				258.544.700,00		259.777.600,00		264.896.000,00		264.896.000,00		232.107.300,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
terselenggaranya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	107	812.052.600,00	107	812.052.650,00	107	812.052.650,00	107	812.052.650,00	107	812.052.650,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	27	27.450.400,00	27	38.281.125,00	27	21.650.000,00	27	21.650.000,00	27	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	14	131.509.200,00	14	177.069.000,00	14	150.000.000,00	14	150.000.000,00	14	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				27.450.400,00		38.281.125,00		21.650.000,00		21.650.000,00		30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	27	27.450.400,00	27	38.281.125,00	27	21.650.000,00	27	21.650.000,00	27	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				131.509.200,00		177.069.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	14	131.509.200,00	14	177.069.000,00	14	150.000.000,00	14	150.000.000,00	14	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				812.052.600,00		812.052.650,00		812.052.650,00		812.052.650,00		812.052.650,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	107	812.052.600,00	107	812.052.650,00	107	812.052.650,00	107	812.052.650,00	107	812.052.650,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Peningkatan Partisipasi Lembaga/Masyarakat				1.358.079.800,00		1.332.494.400,00		1.253.495.700,00		1.343.495.700,00		1.670.307.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				256.544.700,00		259.777.600,00		264.896.000,00		264.896.000,00		232.107.300,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
terselenggaranya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	202	1.352.630.400,00	202	1.352.630.400,00	202	1.652.630.450,00	202	1.652.630.450,00	202	1.652.630.450,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	6	147.184.200,00	6	255.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	50	24.716.700,00	50	31.500.000,00	50	25.716.200,00	50	25.716.200,00	50	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				24.716.700,00		31.500.000,00		25.716.200,00		25.716.200,00		30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	50	24.716.700,00	50	31.500.000,00	50	25.716.200,00	50	25.716.200,00	50	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				147.184.200,00		255.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	6	147.184.200,00	6	255.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.352.630.400,00		1.352.630.400,00		1.652.630.450,00		1.652.630.450,00		1.652.630.450,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	202	1.352.630.400,00	202	1.352.630.400,00	202	1.652.630.450,00	202	1.652.630.450,00	202	1.652.630.450,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Peningkatan Partisipasi Lembaga/Masyarakat				1.358.079.800,00		1.332.494.400,00		1.253.495.700,00		1.343.495.700,00		1.670.307.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				256.544.700,00		259.777.800,00		264.896.000,00		264.896.000,00		232.107.300,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
terselenggaranya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	9	30.000.000,00	9	31.741.432,00	9	26.286.900,00	9	26.286.900,00		30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	87	40.000.000,00	87	150.000.000,00	87	150.000.000,00	87	150.000.000,00	87	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	62	447.527.000,00	62	447.527.000,00	62	447.527.000,00	62	447.527.000,00	62	537.527.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				30.000.000,00		31.741.432,00		26.286.900,00		26.286.900,00		30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	9	30.000.000,00	9	31.741.432,00	9	26.286.900,00	9	26.286.900,00		30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				40.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	87	40.000.000,00	87	150.000.000,00	87	150.000.000,00	87	150.000.000,00	87	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				447.527.000,00		447.527.000,00		447.527.000,00		447.527.000,00		537.527.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	62	447.527.000,00	62	447.527.000,00	62	447.527.000,00	62	447.527.000,00	62	537.527.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				171.637.570,00		171.637.570,00		258.101.000,00		258.101.000,00		258.101.000,00		
Peningkatan Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	90	100	171.637.570,00	100	171.637.570,00	100	258.101.000,00	100	258.101.000,00	100	258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				171.637.570,00		171.637.570,00		258.101.000,00		258.101.000,00		258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	171.837.570,00	12	171.837.570,00	12	258.101.000,00	12	258.101.000,00	12	258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				171.837.570,00		171.837.570,00		258.101.000,00		258.101.000,00		258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	171.837.570,00	12	171.837.570,00	12	258.101.000,00	12	258.101.000,00	12	258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Peningkatan Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				171.837.570,00		171.837.570,00		258.101.000,00		258.101.000,00		258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				171.837.570,00		171.837.570,00		258.101.000,00		258.101.000,00		258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Terselenggaranya koordinasi untuk penegakan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perda dan perwa ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	10.000.000,00	12	14.700.000,00	12	7.700.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				10.000.000,00		14.700.000,00		7.700.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	10.000.000,00	12	14.700.000,00	12	7.700.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Peningkatan Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				171.837.570,00		171.837.570,00		258.101.000,00		258.101.000,00		258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				171.837.570,00		171.837.570,00		258.101.000,00		258.101.000,00		258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Terselenggaranya koordinasi untuk penegakan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perda dan perwa ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	4.800.000,00	12	14.700.000,00	12	3.480.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4.600.000,00		14.700.000,00			3.480.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	4.600.000,00	12	14.700.000,00	12		3.480.000,00	12		20.000.000,00	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Peningkatan Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				171.637.570,00		171.637.570,00			258.101.000,00			258.101.000,00	258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				171.637.570,00		171.637.570,00			258.101.000,00			258.101.000,00	258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Terselenggaranya koordinasi untuk penegakan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perda dan perwa ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	3.725.000,00	12	14.490.000,00	12		6.785.000,00	12		20.000.000,00	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3.725.000,00		14.490.000,00			6.785.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	3.725.000,00	12	14.490.000,00	12		6.785.000,00	12		20.000.000,00	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Peningkatan Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				171.637.570,00		171.637.570,00			258.101.000,00			258.101.000,00	258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				171.637.570,00		171.637.570,00			258.101.000,00			258.101.000,00	258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Terselenggaranya koordinasi untuk penegakan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perda dan perwa ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	12.723.800,00	12	14.490.000,00	12		10.121.900,00	12		20.000.000,00	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12.723.800,00		14.490.000,00			10.121.900,00			20.000.000,00	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	12.723.800,00	12	14.490.000,00	12	10.121.900,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Peningkatan Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum				171.637.570,00		171.637.570,00		258.101.000,00		258.101.000,00		258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				171.637.570,00		171.637.570,00		258.101.000,00		258.101.000,00		258.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Terselenggaranya koordinasi untuk penegakan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perda dan perwa ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	10.000.000,00	12	10.891.650,00	12	3.550.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				10.000.000,00		10.891.650,00		3.550.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Lelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	10.000.000,00	12	10.891.650,00	12	3.550.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				357.108.500,00		380.125.900,00		375.000.000,00		464.514.400,00		464.514.400,00		
Peningkatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	90	100	357.108.500,00	100	380.125.900,00	100	375.000.000,00	100	464.514.400,00	100	464.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				357.108.500,00		380.125.900,00		375.000.000,00		464.514.400,00		464.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	250	298.622.900,00	250	298.622.900,00	250	314.514.400,00	250	314.514.400,00	250	314.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	2000	60.485.600,00	2000	63.503.000,00	2000	60.485.600,00	2000	150.000.000,00	2000	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				60.485.600,00		63.503.000,00		60.485.600,00		150.000.000,00		150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	2000	60.485.600,00	2000	63.503.000,00	2000	60.485.600,00	2000	150.000.000,00	2000	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				296.622.900,00		296.622.900,00		314.514.400,00		314.514.400,00		314.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	250	296.622.900,00	250	296.622.900,00	250	314.514.400,00	250	314.514.400,00	250	314.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
Peningkatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				357.108.500,00		360.125.900,00		375.000.000,00		464.514.400,00		464.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				357.108.500,00		360.125.900,00		375.000.000,00		464.514.400,00		464.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	171	12.000.000,00	171	13.000.000,00	171	15.000.000,00	171	25.000.000,00	171	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				12.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	171	12.000.000,00	171	13.000.000,00	171	15.000.000,00	171	25.000.000,00	171	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN PARIT TOKAYA	
Peningkatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				357.108.500,00		360.125.900,00		375.000.000,00		464.514.400,00		464.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				357.108.500,00		360.125.900,00		375.000.000,00		464.514.400,00		464.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	250	10.400.000,00	250	13.000.000,00	250	15.000.000,00	250	25.000.000,00	250	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				10.400.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	250	10.400.000,00	250	13.000.000,00	250	15.000.000,00	250	25.000.000,00	250	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN AKCAYA	
Peningkatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				357.108.500,00		360.125.900,00		375.000.000,00		464.514.400,00		464.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				357.108.500,00		360.125.900,00		375.000.000,00		464.514.400,00		464.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	60	5.746.100,00	60	13.000.000,00	60	15.000.000,00	60	25.000.000,00	60	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5.746.100,00		13.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	60	5.746.100,00	60	13.000.000,00	60	15.000.000,00	60	25.000.000,00	60	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - KELURAHAN KOTABARU	
Peningkatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				357.108.500,00		360.125.900,00		375.000.000,00		464.514.400,00		464.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				357.108.500,00		360.125.900,00		375.000.000,00		464.514.400,00		464.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	98	13.941.800,00	98	13.000.000,00	98	15.000.000,00	98	25.000.000,00	98	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				13.941.800,00		13.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	98	13.941.800,00	98	13.000.000,00	98	15.000.000,00	98	25.000.000,00	98	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	
Peningkatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				357.108.500,00		360.125.900,00		375.000.000,00		464.514.400,00		464.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				357.108.500,00		380.125.900,00		375.000.000,00		484.514.400,00		484.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	100	15.000.000,00	100	13.000.000,00	100	15.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				15.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	100	15.000.000,00	100	13.000.000,00	100	15.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	

#### **4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, maka Kecamatan Pontianak Selatan menetapkan beberapa Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Selatan yang harus tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPD. Target pencapaian kinerja sesuai dengan Pemerintah dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKPJ tahunan dan LKPJ 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang di acui oleh Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Indikator kinerja Kecamatan Pontianak Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pontianak Selatan untuk mewujudkan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pontianak Selatan.

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan Daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada table IV.4 dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra**  
**Pemerintah Kota Pontianak**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN</b>				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN PARIT TOKAYA</b>				
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0002 - KELURAHAN AKCAYA</b>				
8.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
9.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
10.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>7.01.0.00.0.00.03.0003 - KELURAHAN KOTABARU</b>				
11.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
12.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
13.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT</b>				
14.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
16.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT</b>				
17.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
18.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
19.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Selatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pontianak Selatan adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Sebagaimana dijelaskan pada Tabel IV.5 dibawah ini :

**Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN									
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks	-	3,71	3,72	3,73	3,74	3,75	3,76	
3.	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan	Nilai	-	86,15	86,3	86,45	86,6	86,75	86,9	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Selatan	Nilai	-	86	86,1	86,2	86,3	86,4	86,5	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (Lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang secara umum berisi rangkaian rencana Tindakan dan kegiatan mendasar, juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Tahun 2025-2029.

**WALI KOTA PONTIANAK**

**EDI RUSDI KAMTONO**